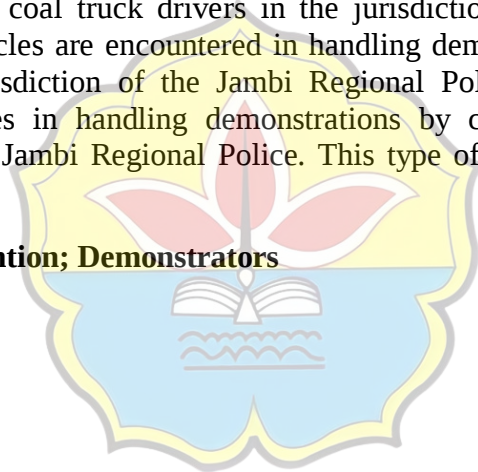


ABSTACT

Demonstrations are a form of public expression guaranteed by law. Regulations regarding these demonstrations are expressly stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 concerning Freedom of Expression in Public. Every citizen has the right to express their opinion as stated in several laws and regulations, but this right also has limitations. The anarchic demonstrations can actually occur due to the presence of provocateurs or rioters who do not fully understand the true meaning of freedom of expression. In this case, we will discuss anarchic demonstrations. Here, we will discuss three things related to handling demonstrations, namely how to handle demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police? What are the obstacles in handling demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police? And how do the police overcome obstacles in handling demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police? The research method used is empirical juridical where the researcher conducted in-depth observations and used literature and field experience as data sources. The researcher's objectives include finding out how to handle demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police, what obstacles are encountered in handling demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police, and how the police overcome obstacles in handling demonstrations by coal truck drivers in the jurisdiction of the Jambi Regional Police. This type of research is a socio-legal research.

Keywords: Prevention; Demonstrators



ABSTRAK

Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang telah dijamin oleh Undang-Undang. Peraturan mengenaiunjuk rasa ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Setiap warga negara memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun hak tersebut juga memiliki batasan. Unjuk rasa yang berlangsung anarkis tersebut sebenarnya dapat terjadi karena hadirnya oknum-oknum provokator atau perusuh yang belum sepenuhnya memahami makna kemerdekaan berpendapat yang sebenarnya. Dalam kasus ini kita akan membahas aksi unjuk rasa yang anarkis. Disini kita akan membahas tuga hal terkait penanggulangan aksi unjuk rasa yaitu bagaimana penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi? apa kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi? dan bagaimana pihak kepolisian mengatasi kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dimana peneliti melakukan observasi mendalam serta menjadikan kepustakaan dan pengalaman lapangan sebagai sumber data. Tujuan peneliti antara lain untuk mengetahui bagaimana penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi, apa kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi dan bagaimana pihak kepolisian mengatasi kendala dalam penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truck batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi. Tipe penelitian adalah dengan pendekatan *socio-legal research*.

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan; Aksi Unjuk Rasa
